



Integrasi Nilai Mapalus dalam Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Penguatan *Civic Disposition*

Arif Subowo

Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia
Email: arifsubowo@unima.ac.id

Article History

Submitted : 2026-05-11

Accepted : 2026-06-07

Revised : 2026-06-06

Published : 2026-06-19

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10755>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai kebangsaan dan kearifan lokal Mapalus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai strategi penguatan *civic disposition* mahasiswa PPKn di Universitas Negeri Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif selama proses pembelajaran, dan studi dokumentasi terhadap RPS, bahan ajar, serta aktivitas evaluasi pembelajaran. Informan penelitian terdiri atas dosen dan mahasiswa PPKn yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Mapalus yang paling relevan dengan penguatan *civic disposition* meliputi solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Integrasi nilai tersebut dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu internalisasi nilai Mapalus dalam perencanaan pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran kolaboratif dan reflektif berbasis kearifan lokal, serta evaluasi autentik terhadap sikap dan partisipasi kewarganegaraan mahasiswa. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran PKN berbasis Mapalus mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam diskusi, lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih bertanggung jawab dalam kerja kelompok, serta lebih mampu menghubungkan identitas lokal Minahasa dengan nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, Mapalus dapat diposisikan sebagai sumber pedagogis-kultural yang relevan dalam membangun pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan watak kewarganegaraan.

Kata Kunci: Mapalus, Kearifan Lokal, Civic Disposition, Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai Kebangsaan

Abstract

This study aims to determine how teacher creativity in applying the Talking Stick model to the learning outcomes of This study aims to analyze the integration of national values and local wisdom of Mapalus (Citizenship Education) in Civics learning as a strategy to strengthen civic disposition in Civics students at Manado State University. The study used a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation during the learning process, and documentation studies of lesson plans (RPS), teaching materials, and learning evaluation activities. The research informants consisted of purposively selected Civics lecturers and students. The results indicate that the Mapalus values most relevant to strengthening civic disposition include social solidarity, collective responsibility, deliberation, equality, and concern for the common good. These values are integrated through three main approaches: internalizing Mapalus values in lesson planning, implementing collaborative and reflective learning strategies based on local wisdom, and authentic evaluation of students' civic attitudes and participation. The research findings demonstrate that Mapalus-based Civics learning encourages students to be more active in discussions, more open to differences, more responsible in group work, and better able to connect Minahasan local identity with Indonesian national values. Thus, Mapalus can be positioned as a relevant pedagogical-cultural resource for developing contextual, participatory civic learning that is oriented toward the formation of civic character.

Keyword: Mapalus, local wisdom, civic disposition, Civic Education, national values.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, toleran,



dan partisipatif. Dalam kerangka kompetensi kewarganegaraan, pembelajaran PKn tidak hanya diarahkan pada penguasaan civic knowledge, tetapi juga pada penguatan *civic skills* dan *civic disposition* sebagai watak kewarganegaraan yang mendorong individu untuk terlibat secara etis dalam kehidupan publik (Branson, 1998; Westheimer & Kahne, 2004). *Civic disposition* menjadi aspek penting karena pendidikan kewarganegaraan yang hanya menekankan pengetahuan formal berisiko menghasilkan pemahaman kewarganegaraan yang kognitif, tetapi lemah dalam praktik sosial. Kajian Geboers et al. (2013), menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh kurikulum formal, iklim pedagogis terbuka, serta pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mempraktikkan nilai kewarganegaraan secara nyata.

Dalam praktik pembelajaran, salah satu persoalan yang masih tampak adalah kecenderungan PKn diajarkan secara normatif, tekstual, dan kurang terhubung dengan pengalaman sosial-budaya mahasiswa. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, musyawarah, gotong royong, solidaritas, toleransi, dan partisipasi sering kali hadir sebagai konsep moral umum, tetapi belum selalu dihubungkan dengan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat mahasiswa. Akibatnya, pembelajaran kewarganegaraan berpotensi menjadi abstrak dan kurang bermakna. Padahal, pendekatan pendidikan yang responsif terhadap budaya menegaskan bahwa latar sosial-budaya peserta didik dapat menjadi sumber belajar yang penting untuk membangun keterlibatan, identitas, dan kebermaknaan pembelajaran (Gay, 2018; Ladson-Billings, 2014). Dalam perspektif pendidikan multikultural, pengakuan terhadap identitas budaya juga penting untuk membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat demokratis yang majemuk (Banks, 2017). Pengembangan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal penting dilakukan karena nilai lokal dapat menjadi sumber kontekstual untuk memperkuat praktik nilai Pancasila dalam pembelajaran (Sumardjoko & Subowo, 2021).

Konteks tersebut relevan dengan pembelajaran PKn di Universitas Negeri Manado, khususnya karena mahasiswa berada dalam lingkungan sosial-budaya Minahasa yang memiliki tradisi Mapalus. Mapalus merupakan tradisi kerja sama masyarakat Minahasa yang menekankan gotong royong, tolong-menolong, tanggung jawab bersama, kebersamaan, dan kepedulian terhadap kepentingan kolektif (Mansi, 2007; Turang et al., 2012). Dalam perkembangan kontemporer, Mapalus juga dipahami sebagai bentuk *local wisdom* yang tetap relevan dalam memperkuat partisipasi sosial, solidaritas komunitas, dan pemberdayaan masyarakat (Nismawati & Nugroho, 2021; Pongantung & Khasanah, 2024). Nilai-nilai tersebut memiliki kedekatan dengan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami nilai demokrasi, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam relasi sosial sehari-hari.

Meskipun demikian, Mapalus belum banyak dikembangkan secara sistematis sebagai sumber pedagogis dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Dalam praktik pembelajaran, Mapalus lebih sering diposisikan sebagai pengetahuan budaya atau identitas lokal, belum sebagai kerangka integratif untuk memperkuat *civic disposition* mahasiswa. Padahal, nilai tolong-menolong dalam Mapalus dapat dikaitkan dengan tanggung jawab warga negara; nilai musyawarah dapat dihubungkan dengan deliberasi demokratis; nilai kesetaraan dapat dikaitkan dengan penghargaan terhadap martabat manusia; dan nilai kepedulian terhadap kepentingan bersama dapat memperkuat partisipasi warga negara. Sejalan dengan itu, Komalasari menegaskan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai kearifan lokal agar pembelajaran mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan akar budaya bangsa (Komalasari, 2009). Gotong royong juga dipandang relevan dalam memperkuat *civic participation* karena mendorong keterlibatan warga dalam kehidupan sosial secara kolektif (Dewanti et al., 2023).

Meskipun kajian tentang kearifan lokal dalam Pendidikan Kewarganegaraan telah berkembang, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan kearifan lokal sebagai sumber nilai, identitas budaya, atau materi kontekstual dalam pembelajaran. Kajian-kajian tersebut umumnya belum secara spesifik menunjukkan bagaimana nilai lokal dioperasionalkan ke dalam desain pembelajaran, aktivitas kelas, dan evaluasi sikap kewarganegaraan mahasiswa. Dalam konteks Mapalus, penelitian sebelumnya lebih banyak membahasnya sebagai praktik sosial masyarakat Minahasa, bentuk gotong royong, solidaritas komunitas, atau mekanisme pemberdayaan sosial. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus mengembangkan Mapalus sebagai kerangka pedagogis untuk memperkuat *civic disposition* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Celah inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini, sebab pembelajaran PKn membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan nilai kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga menghadirkannya melalui pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan sosial-budaya mahasiswa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai Mapalus ke dalam pembelajaran PKn secara lebih sistematis melalui tiga ranah utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi autentik *civic disposition*. Penelitian ini tidak hanya memosisikan Mapalus sebagai objek kajian budaya lokal, tetapi sebagai sumber pedagogis kultural yang dapat diterjemahkan ke dalam strategi pembelajaran kolaboratif, reflektif, dan partisipatif. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka awal Model Integrasi Mapalus-PKn yang menghubungkan nilai-nilai lokal Minahasa dengan penguatan watak kewarganegaraan mahasiswa, khususnya solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Model

ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal, terutama pada konteks perguruan tinggi yang berada dalam lingkungan sosial-budaya tertentu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai kebangsaan dan kearifan lokal Mapalus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya penguatan *civic disposition* mahasiswa PPKn di Universitas Negeri Manado. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Mapalus yang relevan dengan *civic disposition*, mendeskripsikan bentuk integrasinya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PKn, serta menganalisis kontribusinya terhadap penguatan solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan watak kewarganegaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses integrasi nilai kebangsaan dan kearifan lokal Mapalus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta kontribusinya terhadap penguatan *civic disposition* mahasiswa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah pengalaman, makna, praktik pembelajaran, dan dinamika sosial yang muncul dalam konteks alamiah (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016).

Penelitian dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Lokasi ini dipilih secara purposif karena berada dalam lingkungan sosial-budaya Minahasa yang memiliki tradisi Mapalus sebagai salah satu bentuk kearifan lokal. Informan penelitian terdiri atas 3 dosen dan 80 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Manado yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Dosen dipilih karena berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PKn, sedangkan mahasiswa dipilih karena mengalami langsung proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai Mapalus. Pemilihan informan mempertimbangkan keterlibatan dalam pembelajaran, pemahaman terhadap konteks Mapalus, serta kesediaan memberikan data secara mendalam. Jumlah informan dipandang memadai karena data yang diperoleh telah menunjukkan kecenderungan informasi yang berulang pada tema nilai Mapalus, bentuk integrasi pembelajaran, dan penguatan *civic disposition* (Patton, 2015).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman dosen dan mahasiswa mengenai nilai Mapalus, bentuk integrasinya dalam pembelajaran, serta perubahan sikap kewarganegaraan yang dirasakan. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pembelajaran, interaksi kelas, kerja kelompok, musyawarah, partisipasi, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama mahasiswa. Studi dokumentasi dilakukan terhadap Rencana Pembelajaran Semester, bahan ajar, tugas mahasiswa, catatan refleksi, dan dokumen evaluasi pembelajaran yang relevan. Penggunaan tiga teknik ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih utuh dan saling menguatkan (Miles et al., 2014; Yin, 2016).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan pedoman analisis dokumen. Pedoman tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu nilai-nilai Mapalus, bentuk integrasi dalam pembelajaran PKn, dan indikator *civic disposition* yang meliputi tanggung jawab, partisipasi, toleransi, kepedulian terhadap kepentingan bersama, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan tema nilai Mapalus dan indikator *civic disposition*. Pada tahap penyajian data, temuan disusun dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi berulang dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member *checking*, dan *peer debriefing*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari dosen, mahasiswa, dan dokumen pembelajaran, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi ringkasan data kepada informan, sedangkan *peer debriefing* dilakukan melalui diskusi dengan rekan sejawat untuk meninjau ketepatan kategori dan interpretasi temuan (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Mapalus sebagai Penguat *Civic Disposition* Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Mapalus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memunculkan lima kategori nilai utama yang relevan dengan penguatan *civic disposition* mahasiswa, yaitu solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Kelima kategori

tersebut ditemukan melalui wawancara dengan dosen dan mahasiswa, observasi proses pembelajaran, serta telaah dokumen pembelajaran. Solidaritas sosial tampak dalam aktivitas saling membantu, pembelajaran antarteman, dan kesediaan mahasiswa mendukung teman yang mengalami kesulitan memahami materi. Tanggung jawab kolektif muncul dalam kerja kelompok, pembagian tugas, dan komitmen menyelesaikan tugas bersama. Musyawarah terlihat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan kelompok. Kesetaraan tampak melalui pemberian kesempatan yang relatif seimbang kepada setiap mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi. Sementara itu, kepedulian terhadap kepentingan bersama tercermin dalam sikap mahasiswa yang mulai mempertimbangkan keberhasilan kelompok, kenyamanan belajar bersama, dan kepentingan sosial di luar kepentingan individual.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Mapalus tidak hanya hadir sebagai pengetahuan budaya, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai nilai pembelajaran yang mendukung pembentukan *civic disposition*. Solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif memperkuat kesadaran mahasiswa bahwa pembelajaran dan kehidupan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap orang lain. Musyawarah memperkuat kemampuan mahasiswa untuk berdialog, mendengarkan pendapat berbeda, dan mengambil keputusan secara demokratis. Kesetaraan mendorong penghargaan terhadap martabat dan kontribusi setiap anggota kelompok, sedangkan kepedulian terhadap kepentingan bersama memperkuat orientasi mahasiswa pada kebaikan kolektif. Dengan demikian, nilai Mapalus membantu menghubungkan pengetahuan kewarganegaraan dengan sikap dan tindakan nyata dalam proses pembelajaran. Branson (1998) menegaskan bahwa kompetensi kewarganegaraan mencakup *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Dalam konteks penelitian ini, Mapalus membantu menghubungkan pengetahuan kewarganegaraan dengan sikap dan tindakan nyata mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan Nastiti dan Subowo (2024), yang menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berbasis aktivitas kolaboratif dapat memperkuat kerja sama peserta didik sebagai bagian dari pembentukan sikap sosial dalam pembelajaran kewarganegaraan. Hal ini juga relevan dengan pandangan Westheimer dan Kahne (2004), bahwa pendidikan demokrasi tidak cukup membentuk warga negara yang patuh terhadap aturan, tetapi juga warga negara yang partisipatif dan peduli terhadap persoalan publik. Dengan demikian, Mapalus memiliki posisi penting sebagai sumber nilai lokal yang dapat menghidupkan pembelajaran PKn dan memperkuat pembentukan *civic disposition* mahasiswa.

Temuan penelitian diperkuat oleh data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Salah satu informan dosen menyatakan bahwa “Mapalus dalam pembelajaran bukan hanya berarti bekerja bersama, tetapi membiasakan mahasiswa untuk saling membantu, bermusyawarah, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok” (D1, wawancara). Hal serupa disampaikan

mahasiswa yang menyebut bahwa “dalam kelompok, kami belajar tidak hanya membagi tugas, tetapi juga mendengar pendapat teman dan membantu teman yang belum memahami materi” (M2, wawancara). Hasil observasi menunjukkan bahwa nilai Mapalus tampak dalam pembagian peran, diskusi kelompok, musyawarah, dan kesediaan mahasiswa membantu teman yang mengalami kesulitan. Dokumen pembelajaran seperti RPS, tugas kelompok, dan catatan refleksi juga menunjukkan adanya penekanan pada kerja sama, tanggung jawab, partisipasi, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Tabel 1. Matriks Integrasi Nilai Mapalus dan *Civic Disposition* Mahasiswa

Nilai Mapalus	Makna dalam Pembelajaran PKn	Bentuk Integrasi Pembelajaran	Indikator <i>Civic Disposition</i>
Solidaritas sosial	Kesediaan mahasiswa untuk saling mendukung dalam proses belajar	Diskusi kelompok, pembelajaran antarteman, dan saling membantu memahami materi	Peduli terhadap teman, terbuka terhadap kerja sama, dan tidak individualistis
Tanggung jawab kolektif	Kesadaran bahwa keberhasilan belajar merupakan tanggung jawab Bersama	Penugasan kelompok, pembagian peran, presentasi bersama, dan evaluasi proses kerja	Bertanggung jawab, disiplin, berkontribusi aktif, dan tidak bergantung pada anggota lain
Musyawarah	Pengambilan keputusan melalui diskusi dan pertimbangan Bersama	Diskusi kasus, debat terarah, dan penyelesaian masalah kelompok	Partisipatif, demokratis, mampu mendengar, dan menghargai pendapat berbeda
Kesetaraan	Pemberian kesempatan yang adil kepada semua anggota kelompok	Pembagian peran, rotasi kepemimpinan, dan forum diskusi terbuka	Inklusif, menghargai perbedaan, dan tidak mendominasi kelompok
Kepedulian terhadap kepentingan bersama	Kepekaan terhadap kebutuhan kelompok dan persoalan sosial di sekitar	Refleksi isu kewarganegaraan, studi kasus lokal, dan tugas berbasis masalah sosial	Peduli terhadap kepentingan umum, memiliki orientasi sosial, dan mengutamakan kebaikan bersama

Berdasarkan tabel tersebut, integrasi nilai Mapalus dalam pembelajaran PKn menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman nilai sebagai konsep budaya menuju nilai sebagai praktik pedagogis. Solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif tidak hanya muncul dalam pernyataan informan, tetapi juga terlihat dalam aktivitas pembagian peran, kerja kelompok, dan kesediaan mahasiswa membantu teman yang mengalami kesulitan. Musyawarah dan kesetaraan tampak ketika mahasiswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan berbeda, dan mengambil keputusan secara bersama. Sementara itu, kepedulian terhadap kepentingan bersama terlihat dari orientasi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas bukan hanya sebagai tanggung jawab individu, tetapi sebagai keberhasilan

kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa Mapalus berfungsi sebagai jembatan antara nilai lokal Minahasa dan pembentukan *civic disposition* mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, kontribusi Mapalus terhadap *civic disposition* tidak terletak pada pengenalan nilai lokal semata, tetapi pada kemampuannya membentuk pengalaman belajar yang menuntut mahasiswa untuk berpartisipasi, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Proses ini memperlihatkan bahwa *civic disposition* lebih mudah dikembangkan ketika nilai kewarganegaraan tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dialami melalui praktik sosial yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Dalam konteks ini, Mapalus menjadi dasar kultural yang memperkuat pembelajaran PKn agar lebih kontekstual, partisipatif, dan bermakna.

Integrasi Mapalus dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran PKn

Model Integrasi Mapalus-PKn dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka pedagogis yang menghubungkan nilai-nilai lokal Mapalus dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya penguatan *civic disposition* mahasiswa. Model ini dibangun melalui tiga tahapan utama, yaitu internalisasi nilai dalam perencanaan pembelajaran, implementasi nilai dalam aktivitas pembelajaran kolaboratif dan reflektif, serta evaluasi autentik terhadap sikap dan partisipasi kewarganegaraan mahasiswa. Pada tahap perencanaan, nilai solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama dihubungkan dengan capaian pembelajaran, materi, strategi, bahan ajar, dan indikator penilaian. Dengan demikian, nilai Mapalus tidak ditempatkan sebagai tambahan materi semata, tetapi menjadi bagian dari desain pembelajaran PKn.

Pada tahap pelaksanaan, nilai Mapalus diwujudkan melalui aktivitas diskusi kelompok, studi kasus lokal, kerja kolaboratif, musyawarah, pembagian peran, dan refleksi pengalaman sosial mahasiswa. Solidaritas sosial tampak melalui kebiasaan saling membantu dalam memahami materi; tanggung jawab kolektif tampak dalam komitmen menyelesaikan tugas kelompok; musyawarah terlihat dalam proses pengambilan keputusan bersama; kesetaraan tercermin dari kesempatan yang relatif seimbang bagi setiap mahasiswa untuk berpendapat; sedangkan kepedulian terhadap kepentingan bersama muncul dalam orientasi mahasiswa untuk mengutamakan keberhasilan kelompok dan kepentingan sosial. Melalui aktivitas tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami nilai kewarganegaraan secara konseptual, tetapi juga mengalaminya dalam praktik pembelajaran.

Pada tahap evaluasi, penguatan *civic disposition* dinilai melalui bentuk evaluasi autentik yang menekankan partisipasi, tanggung jawab, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama mahasiswa. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi PKn, tetapi juga pada perilaku mahasiswa selama proses pembelajaran.

Dengan demikian, Model Integrasi Mapalus-PKn menunjukkan bahwa nilai lokal Minahasa dapat berfungsi sebagai sumber pedagogis-kultural yang menghubungkan pembelajaran PKn dengan pengalaman sosial mahasiswa. Model ini berkontribusi pada pengembangan pembelajaran kewarganegaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan watak kewarganegaraan.

Pola integrasi tersebut menunjukkan bahwa Mapalus dapat dipahami sebagai sumber pedagogis dalam pembelajaran PKn. Temuan ini sejalan dengan teori *Culturally Responsive Teaching* yang dikembangkan Gay (2018), bahwa latar belakang budaya peserta didik dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan relevansi, keterlibatan, dan kebermaknaan proses belajar. Dalam penelitian ini, Mapalus tidak ditempatkan hanya sebagai objek pembahasan budaya lokal, tetapi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan aktivitas pembelajaran. Artinya, budaya lokal tidak berhenti sebagai ilustrasi, tetapi menjadi bagian dari strategi pedagogis.

Pandangan ini juga sejalan dengan Ladson-Billings (2014) melalui konsep *culturally relevant pedagogy*, yang menekankan pentingnya pembelajaran yang menghubungkan capaian akademik, kompetensi budaya, dan kesadaran kritis. Hal ini sejalan dengan Winataputra dan Budimansyah (2012), yang menekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus dirancang secara sistematis untuk membentuk kompetensi kewarganegaraan secara utuh, bukan hanya pengetahuan kewarganegaraan. Evaluasi autentik juga relevan dengan pandangan Torney-Purta et al. (2001), bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sikap, keterlibatan, dan orientasi partisipatif warga negara. Oleh karena itu, penilaian *civic disposition* tidak cukup dilakukan melalui tes kognitif, tetapi perlu mencakup bukti perilaku, partisipasi, dan pengalaman belajar mahasiswa. Integrasi Mapalus memenuhi ketiga aspek tersebut. Secara akademik, mahasiswa memahami konsep kewarganegaraan; secara kultural, mahasiswa mengenali nilai lokal Minahasa sebagai sumber pembelajaran; dan secara kritis, mahasiswa diajak menafsirkan kembali Mapalus sebagai nilai yang relevan untuk kehidupan demokratis masa kini. Dengan demikian, integrasi Mapalus tidak boleh dipahami sebagai romantisasi budaya lokal, tetapi sebagai upaya menerjemahkan nilai lokal ke dalam praktik pembelajaran yang mampu membentuk sikap kewarganegaraan.

Kontribusi Integrasi Mapalus terhadap Penguatan *Civic Disposition* Mahasiswa

Solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif membantu mahasiswa memahami bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan kewajiban sosial terhadap komunitas. Melalui kerja kelompok, pembagian peran, dan kesediaan saling membantu, mahasiswa belajar bahwa keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab bersama. Musyawarah memperkuat partisipasi demokratis karena mahasiswa dilatih

menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan berbeda, dan mengambil keputusan secara bersama. Kesetaraan mendorong mahasiswa untuk menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan pandangan dalam kelompok, sedangkan kepedulian terhadap kepentingan bersama memperkuat orientasi mahasiswa pada kebaikan kolektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn berbasis Mapalus membantu menggeser pembelajaran dari pola yang normatif-abstrak menuju pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Dalam pembelajaran berbasis Mapalus, mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tetapi terlibat dalam diskusi, kerja kelompok, musyawarah, refleksi pengalaman, dan pengambilan keputusan bersama. Nilai kewarganegaraan menjadi lebih mudah dipahami karena dialami secara langsung dalam proses pembelajaran.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Geboers et al. (2013), yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih efektif ketika peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memberi ruang bagi diskusi terbuka, partisipasi, praktik demokratis, dan keterlibatan sosial. Print (2007) juga menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong partisipasi pemuda dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks penelitian ini, nilai musyawarah dalam Mapalus menjadi basis bagi mahasiswa untuk belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, mengelola perbedaan, dan mencapai kesepakatan. Dengan demikian, partisipasi tidak lagi dipahami sebagai konsep dalam materi PKn, tetapi dialami sebagai praktik belajar.

Musyawarah dan Kesetaraan Mapalus dalam Pembentukan Warga Demokratis

Nilai musyawarah dan kesetaraan menjadi dua aspek penting dalam integrasi Mapalus. Nilai musyawarah tampak dalam aktivitas diskusi kelompok dan pengambilan keputusan bersama, sedangkan nilai kesetaraan tampak dalam pembagian peran, penghargaan terhadap pendapat, serta kesempatan yang sama bagi mahasiswa untuk berkontribusi. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa belajar bahwa kerja bersama hanya dapat berjalan baik apabila setiap anggota diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan menjalankan tanggung jawab secara adil.

Secara teoritis, temuan ini dapat dikaitkan dengan gagasan demokrasi deliberatif Habermas (1996). Dalam demokrasi deliberatif, keputusan yang baik tidak dihasilkan melalui dominasi satu pihak, tetapi melalui komunikasi rasional, pertukaran argumen, dan kesediaan untuk mendengarkan pihak lain. Dalam pembelajaran PKn berbasis Mapalus, mahasiswa dilatih mengalami proses deliberatif dalam bentuk sederhana, yaitu berdiskusi, bermusyawarah, dan menyepakati keputusan kelompok. Dengan demikian, nilai musyawarah Mapalus dapat menjadi sarana pedagogis untuk melatih sikap demokratis mahasiswa.

Nilai kesetaraan dalam Mapalus juga memiliki hubungan dengan gagasan pendidikan multikultural Banks (2017). Banks menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu membentuk warga negara yang mampu hidup dalam masyarakat plural dan menghargai perbedaan identitas. Dalam konteks penelitian ini, nilai kesetaraan membantu mahasiswa memahami bahwa setiap anggota kelompok memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Mahasiswa yang berbeda latar belakang, kemampuan, dan pandangan diberi ruang untuk berkontribusi. Hal ini memperkuat sikap toleran dan inklusif sebagai bagian dari *civic disposition*. Dengan demikian, Mapalus bukan hanya relevan dengan gotong royong, tetapi juga dengan pembentukan warga demokratis.

Tantangan Implementasi dan Implikasi Pengembangan

Penelitian ini juga menemukan tiga tantangan utama dalam integrasi Mapalus. Pertama, pemahaman dosen terhadap Mapalus belum sepenuhnya sama, terutama dalam menerjemahkan nilai budaya ke dalam strategi pembelajaran dan indikator evaluasi. Kedua, sebagian mahasiswa masih memandang kearifan lokal sebagai sesuatu yang tradisional sehingga perlu dibantu untuk melihat relevansinya dengan kehidupan kewarganegaraan modern. Ketiga, sumber belajar yang secara khusus menghubungkan Mapalus dengan pembelajaran PKn masih terbatas, baik dalam bentuk modul, studi kasus, bahan ajar, maupun instrumen penilaian.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan berbasis kearifan lokal tidak hanya ditentukan oleh kekayaan nilai budaya, tetapi juga oleh kemampuan pendidik menerjemahkan nilai tersebut ke dalam desain pembelajaran. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu bergerak dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual-kultural. Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup hanya mengajarkan konsep negara, demokrasi, dan hak warga negara, tetapi harus memberi pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa mengalami nilai kewarganegaraan dalam konteks sosial yang dekat dengan kehidupan mereka.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan perangkat pembelajaran berbasis Mapalus, seperti modul, studi kasus, panduan diskusi, rubrik observasi *civic disposition*, dan instrumen refleksi mahasiswa. Dosen juga memerlukan penguatan kapasitas agar mampu menerjemahkan nilai Mapalus ke dalam strategi pembelajaran yang sistematis. Dengan demikian, integrasi Mapalus dalam PKn tidak berhenti sebagai gagasan konseptual, tetapi benar-benar menjadi praktik pedagogis yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada konteks pembelajaran PKn di Program Studi PPKn Universitas Negeri Manado, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas pada semua konteks perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini

berfokus pada pengalaman dosen dan mahasiswa dalam integrasi nilai Mapalus, sehingga belum mengukur secara kuantitatif perubahan *civic disposition* mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas Model Integrasi Mapalus-PKn melalui pendekatan campuran, penelitian tindakan kelas, atau pengembangan perangkat pembelajaran berbasis nilai Mapalus.

SIMPULAN

Integrasi nilai kearifan lokal Mapalus (solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama) ke dalam pembelajaran PKn terbukti secara empiris mampu memperkuat *civic disposition* mahasiswa. Penguatan ini berhasil dilakukan melalui rekonstruksi kurikulum mikro yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan kolaboratif, hingga evaluasi perilaku autentik. Mapalus berhasil direposisi bukan sekadar sebagai materi kebudayaan yang pasif, melainkan sebagai sumber pedagogis-kultural aktif yang menghidupkan ruang kelas PKn menjadi lebih kontekstual dan deliberatif. Penelitian ini merekomendasikan institusi pendidikan tinggi untuk menyusun perangkat pembelajaran terstandarisasi berbasis nilai lokal guna memitigasi kendala teknis dan perbedaan persepsi pendidik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2017). Failed citizenship and transformative civic education. *Educational Researcher*, 46(7), 366–377. <https://doi.org/10.3102/0013189X17726741>.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- CIVITAS. (1994). *National standards for civics and government*. Center for Civic Education.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewanti, P. A., Alhudawi, U., & Hodriani, H. (2023). Gotong royong dalam memperkuat partisipasi warga negara (*civic participation*). *Pancasila and Civics Education Journal*. 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.30596/pcej.v2i1.13753>.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2013). Review of the effects of citizenship education. *Educational Research Review*.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Komalasari, K. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai kearifan lokal untuk menghadapi tantangan global. *Jurnal Civicus*. 9(2). <https://doi.org/10.17509/civicus.v9i2.26101>.
- Ladson-Billings, G. (2014). Culturally relevant pedagogy 2.0: A.K.A. the remix. *Harvard Educational Review*. 84(1), 74–84. <https://doi.org/10.17763/haer.84.1.p2rj131485484751>

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mansi, L. (2007). Fungsi dan peran tradisi Mapalus dalam masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. *Al-Qalam*.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nastiti, R. S., & Subowo, A. (2024). Efektivitas model pembelajaran *role playing* terhadap peningkatan kerjasama dalam pembelajaran PPKn: Studi kelas VII D SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*,
- Nismawati, N., & Nugroho, C. (2021). Pelestarian akulturasi adaptasi budaya Mapalus daerah Minahasa Sulawesi Utara. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 8(1). 8(1), 45–52. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i3.19576>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pongantung, R. J., & Khasanah, D. R. A. U. (2024). Model partisipasi masyarakat melalui Mapalus sebagai *local wisdom* dalam eksistensi hukum dan masyarakat di Minahasa Selatan. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).
- Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies*. 55(3), 325–345. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00382>.
- Sumardjoko, B., & Subowo, A. (2021). The implementation of Javanese local wisdom values as strengthening the practice of Pancasila. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 4(4), 186–193. <https://doi.org/10.20961/shes.v4i4.50610>
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. IEA.
- Turang, T. I., Suman, A., Mandang, J., & Soemarno. (2012). Kajian peran Mapalus dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Tomohon. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 15(4), 1–7.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*. 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*. Widya Aksara Press.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional: Konteks, teori, dan profil kinerja*. Widya Aksara Press.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2nd ed.). Guilford Press.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Gavin Kalam Utama.